

PENTINGNYA PENYESUAIAN REGULASI PERDAGANGAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN

(LISBET, MANDALA HAREFA, RIYADI SANTOSO, YOSEPHUS MAINAKE)

LATAR BELAKANG

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah diterbitkan dan diundangkan pemerintah setelah pembahasan bersama DPR RI. Tentu telah terjadi banyak hal dengan dinamika dan perkembangan di lapangan setelah delapan tahun implementasi UU Perdagangan tersebut.

PERMASALAHAN

perkembangan aktivitas perdagangan nasional dan luar negeri setelah adanya uu Perdagangan dalam mendukung pemulihan ekonomi dan pemulihan kegiatan perdagangan pasca pandemi Covid-19 dan implementasinya dalam kegiatan perdagangan dengan perkembangan infrastruktur dan *e-commerce* serta penyesuaian regulasi Pemerintah Daerah dalam penerapannya, selanjutnya penyesuaian dengan adanya Perpu Ciptaker oleh Pemerintah Daerah dan implementasi UU Perdagangan terhadap kegiatan perdagangan luar negeri terutama dalam kegiatan ekspor dan impor.

TUJUAN

Untuk mendapatkan data atau informasi mengenai perkembangan terakhir terkait permasalahan kegiatan perdagangan, terutama dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi.

KESIMPULAN

UU Perdagangan dalam pelaksanaannya telah berjalan cukup baik, bahkan dengan adanya UU Cipta Kerja sangat direspon positif mengingat dapat menciptakan peluang investasi yang meningkat. Perubahan terhadap UU Perdagangan, perlu dipikirkan secara mendalam agar dapat mengangkat kemajuan perdagangan dan bangsa Indonesia menjadi bangsa saudagar dan penjelajah yang menguasai perdagangan di nusantara dan kawasan asia tenggara.

REKOMENDASI

Perubahan, revisi dan penyempurnaan UU perdagangan menjadi keniscayaan yang perlu dilakukan ke depan oleh DPR RI bersama Pemerintah. Perlindungan konsumen dan pelaku usaha *e-commerce* harus sama-sama terjamin kepastian, kewajiban dan hak-haknya serta perlunya harmonisasi UU tentang Perdagangan dengan UU terkait, harus dilakukan secara cermat untuk menghindari berbagai benturan dan tumpang tindih, baik dalam tingkat pemahaman penafsiran dan pelaksanaan UU hingga kebijakan di lapangan/daerah. selanjutnya DPR perlu mendorong Pemerintah dalam pengembangan UMKM dengan digitalisasi UMKM khususnya instansi daerah yang berhadapan langsung UMKM.

**Hasil Pengumpulan Data Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI 2023**